



WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 160.749.021.080,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua puluh satu ribu delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 160.749.021.080,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua puluh satu ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 80.985.640.040,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.842.529.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.845.737.735,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 47.075.114.305,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 80.985.640.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp 7.150.000.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp 10.950.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp 15.350.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan Rp 1.135.640.040,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah);
 - g. Pajak Parkir Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Pajak Air Tanah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - i. Pajak Sarang Burung Walet Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.150.000.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.950.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.350.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.135.640.040,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah)
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 20.842.529.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp 4.265.786.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp 14.076.743.000,00 (empat belas miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.265.786.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.076.743.000,00 (empat belas miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 11.845.737.735,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari Bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp 11.845.737.735,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 47.075.114.305,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp 363.946.305,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Hasil Kerja sama daerah Rp 436.218.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. Jasa Giro Rp 1.918.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - f. Pendapatan denda pajak daerah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Pendapatan BLUD Rp 43.072.200.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - i. Pendapatan Dari Pengembalian Rp 78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 363.946.305,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 436.218.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.918.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 43.072.200.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 921.758.417.560,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 828.316.304.213,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 93.442.113.347,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.264.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.162.063.829.980,00 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 869.523.179.716,00 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja pegawai Rp 433.889.881.232,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Belanja barang dan jasa Rp 327.142.076.154,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah);
 - c. Belanja hibah Rp 105.562.122.330,00 (seratus lima miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah); dan
 - d. Belanja bantuan sosial Rp 2.929.100.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

- (2) belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 433.889.881.232,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 327.142.076.154,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (4) belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 105.562.122.330,00 (seratus lima miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (5) belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.929.100.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 287.540.650.264,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja modal tanah Rp 7.368.938.550,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin Rp 14.412.396.704,00 (empat belas miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah);
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan Rp 151.772.927.002,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua rupiah);
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp 102.901.921.148,00 (seratus dua miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya Rp 11.084.466.860,00 (sebelas miliar delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

- (2) belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.368.938.550,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.412.396.704,00 (empat belas miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (4) belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.772.927.002,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua rupiah).
- (5) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 102.901.921.148,00 (seratus dua miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.084.466.860,00 (sebelas miliar delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 76.292.391.340,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp 81.292.391.340,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp 81.292.391.340,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri dari Penyertaan modal daerah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp 76.292.391.340,00) (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 76.292.391.340,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

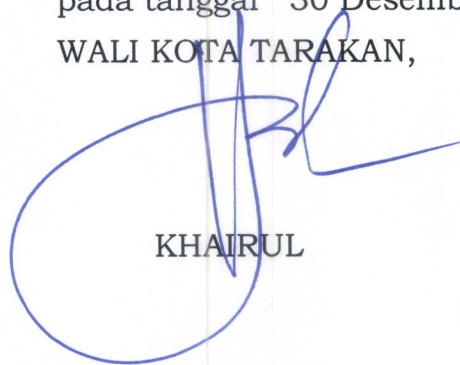
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Desember 2022
WALI KOTA TARAkan,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2022 NOMOR 525

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.749.021.080
4.1.01	Pajak Daerah	80.985.640.040
4.1.01.06	Pajak Hotel	7.150.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	7.150.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	7.150.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.950.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.950.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.950.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.500.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	150.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	150.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.700.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.700.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	25.305.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	25.305.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	75.300.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	75.300.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	299.395.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	299.395.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	250.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	250.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.210.500.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.210.500.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.597.750.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.597.750.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.914.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.914.000
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	1.750.000
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	1.750.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	185.086.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	185.086.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	15.350.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.350.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.350.000.000

KOTA TARAKAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.11	Pajak Parkir	750.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	750.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	750.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	650.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	650.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	650.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.135.640.040
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.135.640.040
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.135.640.040
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	20.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	20.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	20.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	20.842.529.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.265.786.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	727.950.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	66.000.000
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	1.950.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	660.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	256.240.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	256.240.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.612.800.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.612.800.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	798.720.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	798.720.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	100.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	100.000.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	395.076.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	395.076.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	14.076.743.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.216.585.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.082.985.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	600.300.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	449.700.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	41.600.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	42.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	48.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	48.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.042.088.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.042.088.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	44.550.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	44.550.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	240.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	240.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.478.020.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.478.020.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.500.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	7.500.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.845.737.735
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.845.737.735
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.136.737.735
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.136.737.735
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	8.709.000.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	8.709.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	47.075.114.305

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	363.946.305
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	363.946.305
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	363.946.305
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.500.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.500.000
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	436.218.000
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	436.218.000
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	436.218.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.918.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.918.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.918.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.100.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.100.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.100.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	102.000.000
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	25.000.000
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.000.000
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	15.000.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	15.000.000
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	45.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.500.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	800.000
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	800.000
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	700.000
4.1.04.13.03.0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000
4.1.04.13.03.0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	78.750.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	78.750.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	78.750.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	43.072.200.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	43.072.200.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	43.072.200.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	921.758.417.560
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	828.316.304.213
4.2.01.01	Dana Perimbangan	810.657.739.213
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	249.266.429.213
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	90.772.466.744
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	17.100.270.509
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	89.308.198
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	14.399.471.592
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	672.342.303
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	122.327.437.353
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.173.229.751
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.731.902.763
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	438.920.698.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	423.898.584.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.022.114.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.024.829.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	590.188.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.451.859.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.060.040.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.577.245.000
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	609.725.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.217.762.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	518.010.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	93.445.783.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	39.604.380.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.670.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	32.419.027.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	396.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.980.770.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.128.160.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.965.165.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	456.942.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	354.700.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.148.564.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	522.075.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.658.565.000
4.2.01.02.01	DID	17.658.565.000
4.2.01.02.01.0001	DID	17.658.565.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.442.113.347
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	73.717.713.347
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.717.713.347
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.200.926.671
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.619.403.543
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.928.558.692
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	317.859.305
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.650.965.136
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	19.724.400.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	19.724.400.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	19.724.400.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.264.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	264.000.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	264.000.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	264.000.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	264.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.085.771.438.640
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	869.523.179.716
5.1.01	Belanja Pegawai	433.889.881.232
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	216.390.021.606
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	155.588.744.184
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	147.142.112.269
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.446.631.915
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.832.767.112

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.133.476.000
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	699.291.112
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.684.880.191
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.684.880.191
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.224.437.831
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.254.335.831
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	970.102.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.933.618.362
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.447.738.362
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	485.880.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.388.114.119
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.001.536.159
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	386.577.960
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	156.821.231
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	156.821.231
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.225.738
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.714.725
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	511.013
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.117.943.287
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.117.943.287
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	306.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	306.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	900.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	900.000.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.249.469.551
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.249.469.551
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	157.437.924.983
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	152.361.056.875
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	152.327.936.875
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	33.120.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.076.868.108
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.076.868.108
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.844.097.706
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.636.750.640
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	376.045.313
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	301.962.500
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	29.484.375
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	150.875.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	652.375.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	21.781.250
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	27.625.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	22.312.500
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.789.702
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	592.500.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	425.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	525.064.566
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	18.316.969
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.812.500
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	54.835.200
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.985.470
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.100.000
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.762.500
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	956.250
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.593.048
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	250.509.763
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.394.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	18.432.981
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.420.032
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	6.375.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.835.540
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	47.813
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	79.687.500
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.419.027.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	32.419.027.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	396.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	396.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.613.610.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.613.610.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.253.645.500
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.853.695.500
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	383.750.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	16.200.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.915.680.955
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	796.790.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	796.790.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.050.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.050.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	216.166.231
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	216.166.231
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.310.944
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.310.944
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	76.685.680
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	76.685.680
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.000.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.128.000.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	122.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.006.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.536.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.536.000.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	653.018.082
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.911.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.911.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.043.909
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.043.909
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	31.919.959
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	31.919.959
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	786.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	786.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	59.132
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	59.132
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	360.053.202
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	48.262.500
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	35.525.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.750.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	13.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	76.750.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.562.500
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.250.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.625.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.328.202
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	120.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	92.964.880
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.232.407
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.437.500
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.676.800

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.703.319
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	900.000
5.1.01.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	487.500
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	168.750
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.222.303
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	44.514.030
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	246.000
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.252.879
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	250.594
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	1.125.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.676.860
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	8.438
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	14.062.500
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	726.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	714.280.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	714.280.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	714.280.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	208.857.900
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	208.857.900
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	208.857.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.142.076.154
5.1.02.01	Belanja Barang	41.480.412.534
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.478.534.874
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	43.597.290
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.650.247.099

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.269.081.816
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.478.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	12.200.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	27.055.020
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.033.600
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.056.062.065
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.070.904.150
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	13.995.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	307.188.020
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.161.942.365
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.124.711.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	105.040.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	562.516.638
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	124.990.920
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.452.234.390
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.500.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.900.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	522.546.655
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.285.434.211
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	492.511.110
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	19.996.172
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.397.798.450
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.871.312.920
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	773.322.850
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	8.438.286
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.158.034.750
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.931.545.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	54.300.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.910.117.410
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	45.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.094.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	145.026.975
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	170.445.760
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	1.800.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	75.431.750
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	123.726.500

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	365.543.902
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	109.430.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.877.660
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.877.660
5.1.02.02	Belanja Jasa	91.026.352.255
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.001.593.602
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.270.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.361.425.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	140.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	174.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.700.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	15.701.200
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	51.720.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.282.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.250.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.380.027.618
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	180.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.902.530.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.090.000.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.140.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	478.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.105.378.400
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.747.546.976
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	478.982.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.412.724.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	864.576.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.558.743.600
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	410.310.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	25.750.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	259.350.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	199.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	56.900.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	130.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	22.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.376.658.050

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	396.541.319
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.061.501.627
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14.725.649.125
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	23.785.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.528.876.428
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	74.340.417
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	583.998.842
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	429.528.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	10.000.000
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	40.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.538.923.726
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.434.688.320
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.305.883.134
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	741.352.272
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	19.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.834.238.120
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	600.000
5.1.02.02.04.0025	Belanja Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan	399.600.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	91.837.440
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.150.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.150.000
5.1.02.02.04.0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	5.700.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	12.339.540
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	685.943.620
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	170.866.520
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.920.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.700.000
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	408.431.000
5.1.02.02.04.0438	Belanja Sewa Elektrik	34.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.025.107.680
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	87.643.680
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	692.464.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.500.000
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	240.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	84.900.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	8.250.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	76.650.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	666.550.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	10.000.000
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	100.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	61.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	380.000.000
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	115.550.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	951.500.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	90.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	850.000.000
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	11.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	736.012.525
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	55.953.125
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	680.059.400
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	157.526.602
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	24.131.250
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	17.762.500
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.875.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.500.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	38.375.000
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.281.250
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.625.000
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.312.500
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.164.102
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	37.500.000
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	25.000.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	30.000.000
5.1.02.02.14.0012	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	30.000.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.185.770.230
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.869.241.255
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	25.000.000
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	657.155.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	994.190.500
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.660.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.245.910
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	76.517.500
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	27.242.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	194.174.900
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	145.463.190
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	330.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	167.200.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	119.144.280
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.660.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	131.850.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	169.869.400
5.1.02.03.02.0464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	7.238.575
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.336.738.219
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.410.778.219
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	25.000.000
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.000.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	68.500.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	512.460.000
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	250.000.000
5.1.02.03.03.0051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	10.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.847.644.200
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	1.847.644.200
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	132.146.556
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	132.146.556
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.029.181.956
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.029.181.956
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.963.046.956
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.066.135.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.385.011.475
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.900.115.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	735.565.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.164.550.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.484.896.475
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	60.321.269.815
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	163.626.660
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	51.750.871.535
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	51.750.871.535
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	51.750.871.535
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.284.476.169
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.284.476.169
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.284.476.169
5.1.05	Belanja Hibah	105.562.122.330
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.237.664.119
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.237.664.119
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.237.664.119
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	96.489.333.401
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.068.784.150
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.431.682.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.637.102.150
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.041.916.250
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.331.907.400
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.710.008.850
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	70.378.633.001
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	900.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	69.478.633.001
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.821.380.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.821.380.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.821.380.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.013.744.810
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.013.744.810
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.013.744.810
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.929.100.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.027.660.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.719.550.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.719.550.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	308.110.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	308.110.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	901.440.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	901.440.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	901.440.000
5.2	BELANJA MODAL	287.540.650.264
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.368.938.550
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.368.938.550
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.548.938.550
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.548.938.550
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.820.000.000
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	3.820.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.412.396.704
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	236.003.467
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	209.276.718

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	195.854.445
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	13.422.273
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	26.726.749
5.2.02.01.03.0001	Belanja Modal Alat Penarik	7.300.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10.150.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	9.276.749
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.386.565.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.375.315.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.100.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	201.975.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	73.340.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	11.250.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	7.500.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	3.750.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	183.411.851
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	131.209.051
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	131.209.051
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.200.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.200.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	51.002.800
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	6.060.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	27.693.400
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	17.249.400
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	40.800.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	40.800.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	300.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	30.000.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	7.500.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	3.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.665.921.588
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	909.902.470
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	909.902.470
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.731.034.368
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.250.118.830
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	149.390.780
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	14.164.400
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	275.360.358
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	42.000.000

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.984.750
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	24.984.750
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	323.619.850
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	297.623.850
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.482.950
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	216.340.900
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	60.800.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	25.996.000
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	2.800.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	23.196.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.448.791.280
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	712.296.808
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	102.571.808
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	609.725.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.736.494.472
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.736.494.472
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	380.658.500
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	125.658.500
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	22.500.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	27.658.500
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	75.500.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	250.000.000
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	125.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	125.000.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.000.000
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	5.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.455.785.097
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	834.832.076
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	85.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	253.823.276
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	496.008.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	620.953.021
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	122.321.003
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	473.632.018
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	52.789.200
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	52.789.200

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	37.789.200
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	15.000.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.450.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.450.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	1.450.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	196.677.600
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	196.677.600
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	196.677.600
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.039.923.271
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.039.923.271
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.039.923.271
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.772.927.002
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	136.978.793.002
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	136.978.793.002
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.240.162.000
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	145.000.000
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	2.774.953.500
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.790.109.152
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	38.388.970.783
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	38.107.656.652
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.707.728.493
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.594.417.954
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	28.974.553.559
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	225.240.909
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.030.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.794.134.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.794.134.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.794.134.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.901.921.148
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	58.339.760.553
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	55.708.593.368
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	43.785.711.679
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	9.784.925.689
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.137.956.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.631.167.185
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.631.167.185
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	27.192.251.990

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

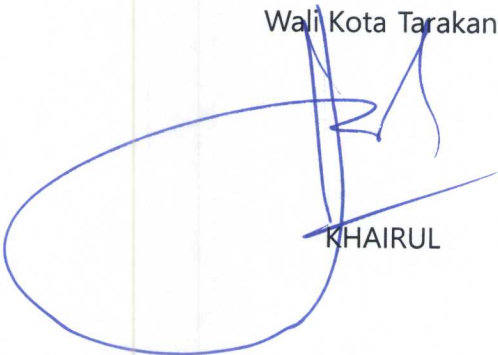
Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	27.192.251.990
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	27.192.251.990
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	17.369.908.605
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.450.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.450.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	10.879.468.605
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	10.879.468.605
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	4.026.900.000
5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	4.026.900.000
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	13.540.000
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	13.540.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.084.466.860
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	151.049.383
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	110.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	110.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	6.049.383
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	6.049.383
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	35.000.000
5.2.05.01.04.0002	Belanja Modal Musik Lainnya	35.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.550.000
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	5.550.000
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	3.000.000
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.550.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.000.000
5.2.05.08.01.0001	Belanja Modal Goodwill	30.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.897.867.477
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.897.867.477
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.897.867.477
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
	Jumlah Belanja	1.162.063.829.980
	Total Surplus/(Defisit)	(76.292.391.340)

KOTA TARAKAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.292.391.340
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.292.391.340
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	81.292.391.340
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	81.292.391.340
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	81.292.391.340
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	81.292.391.340
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	76.292.391.340
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Wali Kota Tarakan



KHAIROL